# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU :**

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UNDANG-UNDANGD Negara Kesatuan RI,* The Habibie Center, Jakarta:2001.

Didik Sukriono. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi; Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Jakarta Timur: Setara Press : 2013.

Subekti, Valina Singka. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintah Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (edisi revisi),PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2008.

Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana:2019.

Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press, 2020.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Prenadamedia Group, 2017.

Wiridin, Darmawan, and Zulfikar Putra. "*Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Negara*." 2022.

Wau, Anggriani, et al. *Hukum Tata Negara*. CV. Intelektual Manifes Media, 2023.

Johan, Teuku Saiful Bahri. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish:2018.

Widodo, Ibnu Sam, et al. *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka: 2023.

Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal,* Tegal: 2023.

**JURNAL :**

Fitriana, M. K. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’S Goal). Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2). https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/403/283Hasrul, M. (2019). Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah. Amanna Gappa. https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6957Hidayat, A. (2017). Negara hukum berwatak Pancasila. Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum. https://www.researchgate.net/profile/Tengku-Erwinsyahbana/publication/326138919\_Perspektif\_Negara\_Hukum\_Indonesia\_Berdasarkan\_Pancasila/links/5b71683345851546c9fd446b/ Sugiharto, I. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 18(1). <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1086/786>

Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi*,*Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(1).*

Atmaja, B. M. D., & Hilman, Y. A. (2023). Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 Tahun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1).*

Pariangu, U. (2023). Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Dibalik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Journal Publicuho, 6(3).*

Zamhasar, Z., Gafar, T. F., Suryaningsih, S., Octavia, S., Rosalina, R., & Susanti, D. (2023). Sosialisasi Pengaturan Jabatan Kepala Desa dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa. J-ABDI: *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat..*

K. Endah, “Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Desa,” J. Ilm. *Ilmu Pemerintah., vol. 6, no. 1, 2020.*

Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Korupsi dana desa problematika otonomi desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *8*(2).

Hariri, A. (2018). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum.*

Nadeak, H., Dalla, A. Y., Nuryadin, D., & Hadi, A. S. (2015). Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(3).

Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*.

Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprapto, S. (2019). Analisis undang-undang Desa. Dialetika: *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, 4(1).*

Pambudhi, H. D. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitualisme. *Wijaya Putra Law Review*, 2(1).

Arliman, L. (2019). Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan uang desa pasca undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Arena Hukum.*

Tajuddin, S., Ikbal, M., & Sulfikar, S. (2020). Fungsi Pemerintahan Desa Terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitue Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan.*

Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Yustitia*.

Basri, S., & Irawan, A. D. (2023, August). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *In Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila (Vol. 2, pp.).*

Prabowo, Y., Hafizar, A., & Kafandi, M. A. (2023). Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis. Jurnal Darma Agung.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum.*

Danil, M. “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUNDANG-UNDANG-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”.*(Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).*

Sandy A. 2023. “Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi”. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2.*

Prabowo, Y., Hafizar, A., & Kafandi, M. A. (2023). Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis. *Jurnal Darma Agung, 31(4).*

**PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022.

PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa.

Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.

**SURAT KABAR :**

Devira Prastiwi, Liputan6, “6 Respon Pro Kontra soal Kepala Desa Minta Penambahan Masa Jabatan 9 Tahun” Dikutip melalui https://www.liputan6.com/news/read/5191049/6-respons-pro-kontra-soal- kepala-desa-minta-penambahan-masa-jabatan-9-tahun diakses pada 20 Agustus 2023, pukul 07:58 WIB.

Dwi Rahmawati, Detik.com, “Revisi Undang-Undang Desa: Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Dana Desa Naik Jadi Rp 2 M dikutp dari https://news.detik.com/berita/d- 6808504/revisi-Undang-Undang-desa-masa-jabatan-kades-9-tahun-dana-desa-naik-jadi- rp-2-m/2 diakses pada 20 Agustus 2023 pada pukul 12:11 WIB.

Databooks diakses darihttps://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/berapa-jumlah- desakelurahan-di-indonesia diakses pada 14 November 2023 pada pukul 21.17 WIB

Anatasya Lavenia, “Pro dan Kontra Tuntuan Kepala Desa Menjabat 9 Tahun”, *cxomedia,* Jakarta, 07 Februari, 2023, [https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20230207153051- 55-177926/pro-dan-kontra-tuntutan-kepala-desa-untuk-menjabat-9-tahun](https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20230207153051-%2055-177926/pro-dan-kontra-tuntutan-kepala-desa-untuk-menjabat-9-tahun), diakses pada 20 September 2023, Pukul 23.22 WIB

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia, “Masa Jabatan 9 Tahun, Siap-siap Kepala Desa Jadi Incaran”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230706062033-4-451734/masa-jabatan-9-tahun-siap-siap-kepala-desa-jadi-incaran> diakses pada 20 September 2023, Pukul 23.22 WIB

PutatGede, kabardetail, “Disetujui... Masa Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun” <https://putatgede.kendalkab.go.id/kabardetail/bys1NkExUjJZcUpRNW4vTjBya2RaUT09/disetujui----masa-jabatan-kepala-desa-jadi-9-tahun.html> diakses pada 20 September 2023, Pukul 23.45 WIB

*Indonesia Corruption Watch* “Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa”, diakses dari https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades- niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa diakses Pada 10 November 2023 pada pukul 03:27 WIB

<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2274/9/UNIKOM_RIZKY%20BAGAS%20PRATAMA_14> diakses pada 03 Desember 2023 pada pukul 09.08 WIB.

<https://jdih.bolmutkab.go.id/login/detailberita/120#:~:text=Seperti%20diketahui%20sebelumnya%2C%20masa%20jabatan,tahun%20terhitung%20sejak%20tanggal%20pelantikan>. diakses pada 09 Desember 2023 pada pukul 10.02 WIB.

Bangun Santoso, Suara.com, “PAPDESI” Tolak Masa Jabatan Kades Hingga 27 Tahun”. Dikutip melalui https://www.suara.com/news/2023/02/02/080214/papdesi-tolak-masa- jabatan-kades-hingga-27-tahun diakses pada 12 Desember 2023 pada pukul 20:16 WIB.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

|  |  |
| --- | --- |
| Nama : | Wahyu Arrafi Musyaf |
| NPM : | 5120600135 |
| Tempat/Tanggal Lahir : | Brebes, 12 Mei 2001 |
| Program Studi : | Ilmu Hukum |
| Alamat : | Jl. Zaenal Arifin Timur Rt 03 / Rw 03 Desa Pebatan, Kec. Wanasari, Kab.Brebes |

Riwayat Pendidikan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Sekolah** | **Tahun Masuk** | **Tahun Lulus** |
| 1. | SD Negeri 01 Pebatan | 2006 | 2012 |
| 2. | SMP Negeri 1 Wanasari | 2012 | 2015 |
| 3. | SMA Negeri 1 Bulakamba | 2015 | 2028 |
| 4. | S1 Fakultas Hukum  Universitas Pancasakti Tegal | 2020 | 2024 |

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Brebes, 30 Januari 2024

Hormat saya,

WAHYU ARRAFI MUSYAF